



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 13 Maret 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
UNIT KERJA : BADAN PEMBINAAN BADAN USAHA MILIK DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : BUDI PURNAMA
2. Jabatan : KEPALA BIDANG
3. NHK : 226983

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	1.600.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 140 m2/80 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000		
2. Tanah dan Bangunan Seluas 55 m2/55 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000		
3. Tanah dan Bangunan Seluas 115 m2/60 m2 di KAB / KOTA KOTA YOGYAKARTA , HASIL SENDIRI Rp. 900.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	247.750.000
1. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 2.750.000		
2. MOBIL, TOYOTA AVANZA Tahun 2018, HIBAH TANPA AKTA Rp. 200.000.000		
3. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2019, HIBAH TANPA AKTA Rp. 20.000.000		
4. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2021, HIBAH TANPA AKTA Rp. 25.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	49.500.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	46.222.498
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	1.943.472.498



III. HUTANG

Rp. 100.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 1.843.472.498

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.